

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, perkembangan internet sangatlah pesat. Internet merupakan media yang digunakan sebagai sarana komunikasi yang lambat laun telah menyingkirkan media komunikasi seperti telepon atau sms (*short message service*). Hal ini telah terbukti bahwa di kehidupan sehari-hari pada zaman ini, manusia sudah melekat dengan sebuah jaringan.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pemerintahan atau yang disebut dengan *e-government* membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang direncanakan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. *E-government* juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Penggunaan teknologi informasi dalam pengungkapan informasi keuangan melalui media internet (*Internet Financial Reporting-IFR*) telah dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada para *stakeholder*. Hal ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SJ/2012 tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah yang menginstruksikan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia untuk

menyiapkan menu konten dengan nama “Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD)” dalam *website* resmi pemerintah daerah serta memuat 12 dokumen pengelolaan anggaran dalam *website* terkait. Praktek IFR didorong dengan adanya Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa adanya penyajian informasi keuangan daerah melalui situs resmi pemerintah daerah serta setiap informasi publik bersifat terbuka, dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

(Styles dan Tennyson, 2017) mengungkapkan bahwa internet adalah media yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan sarana yang efektif bagi pemerintah untuk mempublikasikan informasi keuangannya secara *online*. *Internet Financial Reporting* melalui *e-government* merupakan media yang paling memenuhi aspek *value of money* atau 3E (Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomi) untuk menyediakan dan mengumumkan informasi mengenai laporan keuangan kepada semua pemangku kepentingan publik antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, DPRD, BPK, analis ekonomi, investor, kreditur, donatur, dan rakyat (Verawaty 2015).

Aksesibilitas adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemampuan untuk memberikan akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) untuk mengetahui atau memperoleh informasi atas laporan keuangan

berdasarkan prinsip mudah dan biaya murah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak hanya sekedar menyampaikannya ke legislatif, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah.

Menguatnya aksesibilitas informasi laporan keuangan pemerintahan dalam perkembangan sektor publik di Indonesia. Dalam hal organisasi pemerintah, aksesibilitas internet merupakan salah satu media untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan yang dapat dikonsumsi oleh publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan aksesibilitas informasi laporan keuangan menimbulkan implikasi bagi manajemen pada institusi pemerintah untuk memberikan informasi salah satunya adalah informasi dalam laporan keuangan. Informasi laporan keuangan merupakan suatu kebutuhan yang dengan syarat pendukung adanya pemenuhan informasi publik kepada rakyat melalui media dimana rakyat dapat dengan mudah (Verawaty, 2015).

Dengan keberadaan sebuah *website*, pastinya pemerintah berharap proses publikasi secara terbuka. Beberapa pemerintah daerah dengan pemanfaatan teknologi internet yang pesat, sedangkan di beberapa pemerintah lainnya dengan pemanfaatan teknologi internet yang lamban dalam mengungkapkan laporan keuangannya. Di samping itu, diharapkan dengan adanya IFR dapat membantu kelangsungan sebuah pemerintah dalam beroperasi sesuai dengan perkembangan zaman.

Hasil survei yang telah dilakukan pada periode penelitian terkait dengan *website* pemerintah daerah yang dimiliki oleh populasi penelitian, yaitu 60

pemerintah daerah di Sumatera bagian Selatan menunjukkan bahwa 90% *e-government* pemerintah daerah dalam status online yang berjumlah 54 *e-government*, sisanya 6,67% *e-government* yang dimiliki dalam status error (kemungkinan dalam status *under maintenance*) atau hanya 4 *e-government*, 1,67% pemerintah daerah yang tidak memiliki laporan keuangan yang lengkap yaitu 1 *e-government*, dan 1,67% pemerintah daerah bahkan belum memiliki *e-government*, yaitu 1 pemerintah daerah. Hasil survei juga menunjukkan bahwa 90% *e-government* pemerintah daerah telah melakukan transparansi pengelolaan anggaran daerah sesuai Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ/2012, pengungkapan informasi keuangan melalui *e-government*.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 9 (4), kewajiban menyebarkan informasi publik dapat disampaikan kepada masyarakat dengan cara mudah diakses, salah satunya melalui *e-government* yang terlebih hampir semua pemerintah daerah memilikinya. Dengan demikian IFR dapat diterapkan sebagai salah satu konten didalamnya.

Penerapan IFR diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah yang menjadi objek perhatian khusus para pemangku kepentingan pemerintah serta untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi. Perilaku korupsi yang terjadi dalam pemerintah daerah dapat menimbulkan krisis kepercayaan *stakeholder* pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan lebih lanjut dalam optimalisasi IFR sebagai bentuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Manfaat lain dari praktek IFR di lingkungan pemerintah daerah yakni dapat meningkatkan

partisipasi publik dan pengawasan anggaran terhadap pemerintah daerah dalam menjamin pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan.

Praktek IFR merupakan salah satu perwujudan *e-government* terus dikembangkan di Indonesia, terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menjelaskan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan integrasi dan efisiensi manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam merespon tuntutan masyarakat dan sebagai upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, hal tersebut dikaitkan dengan beberapa variabel determinan aksesibilitas *Internet Financial Reporting* antara lain, *size* (jumlah penduduk), *income per capita* (pendapatan per kapita), *debt level* (tingkat hutang), Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah, kekayaan daerah dan tipe pemerintah, serta opini audit.

Kota-kota besar dengan jumlah penduduk yang besar memiliki fungsi akuntansi dan anggaran yang lebih besar memberikan akses lebih mudah terhadap informasi laporan keuangan di internet (Goff dan Pittman 2004) dalam (Verawaty 2015). Hal ini didukung penelitian (Hilmi dan Martani, 2012), (Pratama dan Sujana, 2015) yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting* melalui *e-government*. Dengan demikian populasi penduduk, semakin besar kota, semakin besar jumlah penduduk dan semakin besar

pula anggaran yang dapat terkumpul dan tentunya semakin tinggi pula tuntutan aksesibilitas akan informasi laporan keuangan.

Daerah tingkat pendapatan yang lebih tinggi memiliki tingkat pengawasan politis yang lebih tinggi oleh kelompok masyarakat dan lebih banyak permintaan akan informasi penyediaan laporan keuangan di *website* (Verawaty 2015). Hal ini didukung penelitian (Styles dan Tennyson, 2007), (Wilopo, 2017), (Sinaga, 2011) pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting* melalui *e-government*. Dengan demikian permintaan akuntabilitas yang lebih tinggi dan penggunaan internet yang lebih luas oleh penduduk dengan pendapatan perkapita yang lebih besar mengidentifikasi suatu hubungan yang positif antara pendapatan perkapita pemerintah daerah dan penyediaan laporan keuangan di *website*.

Pemerintah dapat menggunakan hutang untuk membiayai pelayanan dan program yang relevan untuk disediakan bagi penduduk di daerah tersebut. Membiayai pengeluaran daerah dengan hutang mempengaruhi kemampuan daerah tersebut untuk menyediakan program dan pelayanan di masa yang akan datang. Hal ini dapat dicapai melalui pengungkapan informasi yang memfasilitasi pemantauan oleh kreditur dimana debitur akan menuntut transparansi dan akuntabilitas. Hal ini didukung penelitian oleh (Laswad dkk 2005), (Styles & Tennyson, 2007), (Sutaryo dan Budiarmanto, 2013), (Sinaga, 2011) menunjukkan bahwa *debt level* berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting* melalui *e-government*. Dengan demikian semakin tinggi tingkat hutang menyebabkan pengawasan

kreditur terhadap debitur semakin tinggi dalam penggunaan dana yang dipinjam dan seberapa tingkat kesanggupan dalam pengembaliannya kelak.

Daerah dengan pendapatan yang tinggi akan memiliki pengawasan politis yang lebih tinggi oleh kelompok masyarakat dan akan lebih banyak permintaan akan informasi dengan mengikutsertakan informasi terkait ukuran-ukuran kinerja. Pada era transparansi saat ini, masyarakat sadar bahwa mereka berhak atas informasi publik, dimana salah satunya adalah ketersediaan informasi keuangan dalam laporan keuangan. Hal ini didukung dengan penelitian (Pratama dan Sujana, 2015) yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting* melalui *e-government*. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dengan demikian, semakin besar kekayaan daerah, maka semakin besar Pendapatan Asli Daerah terhadap tingkat aksesibilitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi keuangan di *website*.

Menurut UU No. 32 tahun 2004, belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Tingginya belanja pemerintah daerah (pemda) maka semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan dan semakin tinggi keinginan pemda untuk mengungkapkan informasi pelayanan tersebut melalui website pemda untuk menunjukkan kinerja mereka. Hal ini didukung dengan penelitian (Pratama dan Sujana, 2015) bahwa belanja daerah berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting* melalui *e-government*. Berbeda dengan penelitian (Mutihah, 2016) dimana belanja daerah berpengaruh negatif terhadap *Internet Financial Reporting* melalui *e-government*. Belanja

daerah yang tinggi akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas kepada masyarakat maka keinginan untuk mengungkapkan informasi melalui website semakin tinggi.

Kekayaan daerah mencerminkan bagaimana kinerja sebuah Pemda, sehingga jika suatu pemda memiliki kekayaan yang tinggi akan berusaha untuk mempublikasikannya. Semakin besar kekayaan daerah, maka semakin besar tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin besar kekayaan daerah, maka semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Laswad dkk 2005), (Sinaga, 2011), (Hilmi dan Martani, 2012), (Sutaryo dan Budiarmanto, 2013), (Nosihana dan Yaya, 2016), (Pratama dan Sujana, 2015) bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap *Internet Financial Reporting* melalui *e-government*. Dengan demikian kekayaan daerah yang kecil menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang buruk, pemda yang memiliki kinerja yang buruk akan menghindari pengungkapan sukarela dan akan lebih memilih untuk membatasi akses informasi kepada masyarakat. Sedangkan pemda yang berkinerja baik akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak.

Tipe pemerintahan yang berbentuk kota yang penduduknya lebih besar dan lebih banyak informasi yang diungkap pada situsnya, adanya akses internet yang lebih baik pada daerah kota menyebabkan tingkat pengungkapan pada daerah kota lebih tinggi daripada di kabupaten, (Laswad dkk, 2005) dalam (Nosihana dan Yaya, 2016). Dengan demikian tipe pemerintahan berbentuk kota yang penduduknya lebih besar dan beragam membuat situs pemerintah daerahnya lebih canggih dan

lebih banyak informasi yang diungkap pada situsnya, sehingga pemerintah di kota lebih mengoptimalkan hal tersebut terutama dalam pengungkapan laporan keuangan.

Penelitian ini juga menggunakan variabel moderating yang bertujuan untuk memperkuat determinan yaitu opini audit. Opini audit ditentukan dari jumlah temuan audit yang diperoleh pada saat pelaksanaan audit oleh BPK. Opini audit juga didasarkan kepada pengungkapan informasi yang dilakukan pemda dalam LKPD-nya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terkait pelaporan keuangan daerah. Opini audit yang baik didapatkan dari kinerja pemerintahan yang baik dan merupakan gambaran dari tertibnya pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah. Penelitian yang dilakukan (Putri, 2015) dan (Hiola dkk, 2017) menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara opini audit dan pengungkapan informasi keuangan di *website*. Tetapi opini audit dapat memperlemah pengaruh kinerja keuangan terhadap *Internet Financial Reporting* melalui *e-government*. Dengan demikian opini audit yang wajar dapat memperkuat pengaruh kinerja keuangan terhadap kepatuhan pengungkapan informasi keuangan di *website* oleh pemerintah daerah. Sebaliknya, opini audit yang buruk dapat memperlemah pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan informasi keuangan di *website*.

Pada penelitian ini peneliti mengacu pada (Verawaty, 2015), peneliti menggunakan tiga variabel independen yaitu *size* (jumlah penduduk), *income per capita* (pendapatan per kapita), *debt level* (tingkat hutang) dengan dua variabel tambahan mengacu pada penelitian (Mutuha, 2016) yaitu Pendapatan Asli Daerah

(PAD) dan belanja daerah, serta satu variabel mengacu pada penelitian mengacu pada penelitian (Afryansyah dan Haryanto, 2013) yaitu kekayaan daerah, dan satu variabel mengacu pada penelitian (Nosihana dan Yaya, 2016) yaitu tipe pemerintah, sehingga total variabel yang digunakan sebanyak tujuh variabel. Peneliti juga menggunakan opini audit sebagai variabel pemoderasi yang mengacu pada penelitian (Hiola dkk, 2017). Sejauh ini belum ada penelitian mengenai aksesibilitas *Internet Financial Reporting* melalui *e-government* dengan opini audit sebagai pemoderasi yang menjadikan Sumatera Bagian Selatan sebagai objek penelitian.

Motivasi yang melandasi penelitian ini yaitu mengenai permasalahan aksesibilitas laporan keuangan melalui *website* pemerintah daerah di Sumatera Selatan, dimana beberapa kabupaten/kota belum menyediakan atau mempublikasikan semua informasinya secara terbuka kepada publik.

Berdasarkan uraian di atas dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengambil judul **“DETERMINAN AKSESIBILITAS INTERNET FINANCIAL REPORTING MELALUI E-GOVERNMENT DENGAN OPINI AUDIT SEBAGAI PEMODERASI”**.

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini membahas tentang determinan aksesibilitas *Internet Financial Reporting* melalui *e-government*. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aksesibilitas *Internet Financial Reporting* adalah *size* (jumlah penduduk), *income per capita* (pendapatan per kapita), *debt level* (tingkat hutang), pendapatan asli daerah (PAD), belanja daerah, kekayaan daerah, dan tipe

pemerintah. Peneliti menguji apakah terdapat hubungan positif antara ketujuh faktor tersebut terhadap aksesibilitas *Internet Financial Reporting* melalui *e-government* dan apakah opini audit yang baik akan meningkatkan pengaruh positif PAD terhadap aksesibilitas *Internet Financial Reporting* melalui *e-government*.

1.3 Ruang Lingkup Permasalahan

Agar pembahasan ini tidak menyimpang dari permasalahan yang telah dirumuskan, maka dalam penulisan penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup permasalahan hanya membahas tentang determinan aksesibilitas *Internet Financial Reporting* melalui *e-government* pada pemerintah daerah di Sumatera Bagian Selatan 2017.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara rinci tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh *size* (jumlah penduduk), *income per capita* (pendapatan per kapita), *debt level* (tingkat hutang), pendapatan asli daerah (PAD), belanja daerah, kekayaan daerah, dan tipe pemerintah terhadap aksesibilitas *Internet Financial Reporting* melalui *e-government*.
2. Menganalisis pengaruh opini audit pada hubungan PAD terhadap aksesibilitas *Internet Financial Reporting* melalui *e-government*.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan teori dari pengetahuan di bidang akuntansi diharapkan dapat memberikan manfaat berkaitan dengan determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas *Internet Financial Reporting* melalui *e-government*.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan mengenai determinan atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi aksesibilitas *Internet Financial Reporting* melalui *e-government*.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi, literatur, dan informasi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas *Internet Financial Reporting* melalui *e-government*.

1.5 Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan ini yaitu untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terarah serta mempengaruhi pemahaman tentang masalah-masalah yang disajikan dalam skripsi ini, maka penulisannya akan diuraikan dalam bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang akan menjelaskan alasan memilih judul. Bab ini juga memaparkan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai dari penulisan penelitian ini serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang merupakan dasar analisis yang berkaitan dengan aksesibilitas *Internet Financial Reporting* melalui *e-government*, faktor-faktor yang mempengaruhi aksesibilitas *Internet Financial Reporting* melalui *e-government*, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang bagaimana penelitian dilakukan yang terdiri dari variabel penelitian, definisi operasional, populasi dan penentuan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai uraian hasil dan pembahasan yang terdiri dari analisis data, perhitungan statistik, serta pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang beberapa kesimpulan dari hasil analisa dan pembahasan dalam bab IV, serta saran sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.